

ABSTRAK

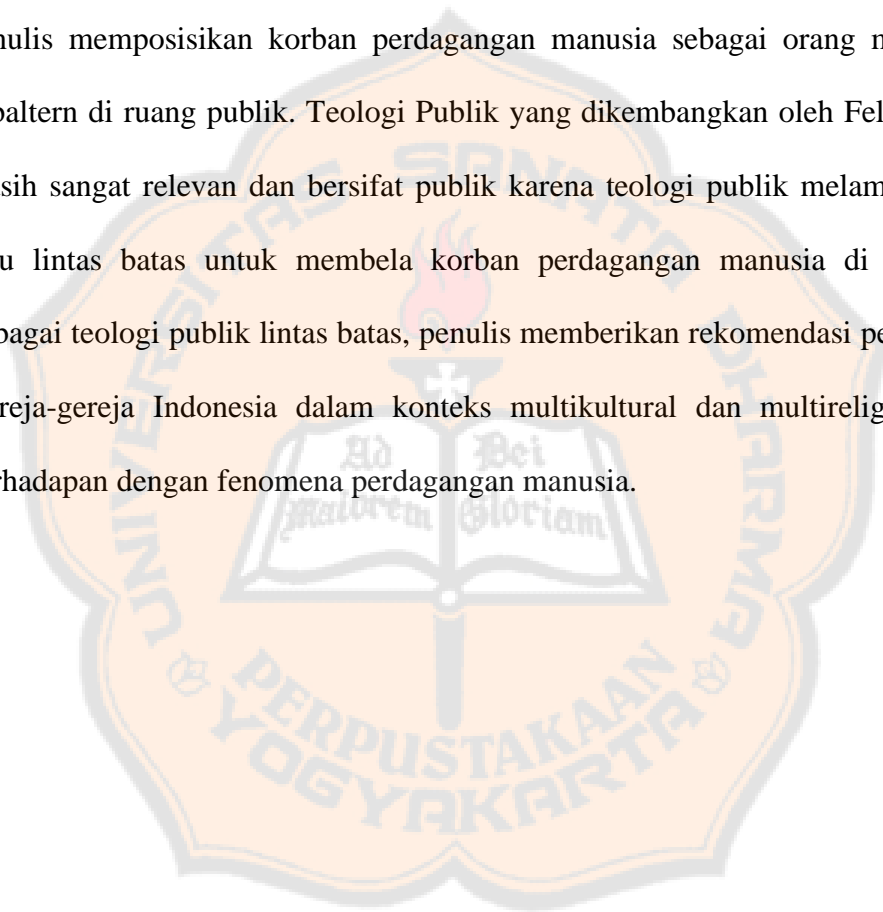
Setiap manusia tidak bisa terlepas dari berbagai krisis dalam kehidupan sehari-hari. Krisis kemanusiaan adalah bagian dari krisis yang mengancam martabat manusia secara keseluruhan di ruang publik. Kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang mengancam martabat manusia secara diskriminatif di ruang publik. Kejahatan perdagangan manusia merupakan tindakan ilegal dan diskriminatif karena mengancam martabat manusia dan lingkungan tempat tinggal manusia di ruang publik. Berhadapan dengan fenomena kejahatan seperti ini, muncul pertanyaan bagaimana krisis kemanusiaan yang terjadi dalam perdagangan manusia ini mendapat pembelaan melalui teologi publik?

Ada tiga pertanyaan mendasar ingin dijawab dalam skripsi ini: (1) Apa yang melatarbelakangi pemikiran teologi publik Felix Wilfred? (2) Bagaimana Felix Wilfred merumuskan Teologi Publik khas Asia untuk membela berbagai isu-isu keprihatinan yang mengancam martabat manusia dan alam? (3) Apa implikasinya teologi publik Felix Wilfred untuk kebutuhan pastoral Gereja Indonesia ketika berhadapan dengan korban perdagangan manusia? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan. Dalam mendukung metode ini, penulis menggunakan beberapa sumber utama teologi publik Felix Wilfred dan sumber-sumber lain sebagai penunjang dalam penulisan skripsi.

Felix Wilfred mengembangkan teologi publik yang bercorak poskolonial dengan fokus pada orang miskin dan subaltern sebagai fokus pembelaan di ruang publik. Corak teologi poskolonial tersebut memiliki empat latar belakang sebagai landasan pengembangan teologi publik, yakni situasi kebijakan Negara yang otoriter (*despotisme state*), situasi ekonomi yang diskriminatif (*tyranny of the market*), situasi tidak harmonis dan tertutup (*exclusive communities and non-harmonious*) dan situasi eksploitasi hasil bumi berlebihan (*commercial the livelihood*). Bagi Felix Wilfred, empat masalah pokok teologi publik diatas berdampak pada krisis kemanusiaan yang mengancam martabat manusia di ruang publik sehingga upaya pembelaan dibutuhkan oleh semua manusia khususnya orang miskin dan kaum subaltern adalah terciptanya kebijakan Publik Negara yang harus melindungi rakyat, kehidupan rakyat harus lebih harmonis dan terbuka (*open-ended*), menciptakan kebutuhan ekonomi yang non-diskriminatif, dan melindungi sisa mata pencaharian akibat perampasan. Proses pembelaan dengan teologi publik lintas batas adalah gerakan teologi publik lintas batas adalah dengan melibatkan gerakan lintas umat beriman (*interreligious*), gerakan lintas masyarakat adat (*intercultural*), gerakan lintas ilmu pengetahuan (*interdisciplinary*), dan gerakan lintas advokasi sosial kemasyarakatan (*social advocacy*). Menurut Felix Wilfred kekhasan teologi publik di ruang publik harus terbuka dan terlibat secara harmonis dan siap bekerja sama dengan banyak pihak dan Teologi publik untuk memihak orang miskin dan subaltern. Kekhasan teologi publik Felix Wilfred bersumber dari tindakan publik Yesus memberi air kehidupan kepada perempuan Samaria. Tindakan publik tersebut sebagai tindakan

kemurahan hati terutama kepada orang yang mengalami krisis kemanusiaan seperti seorang Samaria menolong orang yang tersiksa di jalan (*good Samaritan*).

Berhadapan dengan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masuk dalam kategori krisis kemanusiaan dan proses tindakan pencapaiannya mengancam ekonomi secara diskriminatif bagi orang miskin dan kaum subaltern, penulis memposisikan korban perdagangan manusia sebagai orang miskin dan subaltern di ruang publik. Teologi Publik yang dikembangkan oleh Felix Wilfred masih sangat relevan dan bersifat publik karena teologi publik melampaui batas atau lintas batas untuk membela korban perdagangan manusia di Indonesia. Sebagai teologi publik lintas batas, penulis memberikan rekomendasi penting bagi Gereja-gereja Indonesia dalam konteks multikultural dan multireligius ketika berhadapan dengan fenomena perdagangan manusia.



ABSTRACT

Every human being cannot be separated from various crises in everyday life. Humanitarian crisis is part of a crisis that threatens human dignity as a whole in the public sphere. The crime of human trafficking is a humanitarian crisis that threatens human dignity in a discriminatory manner in the public sphere. The crime of human trafficking is an illegal and discriminatory action because it threatens human dignity and the environment in which humans live in public spaces. Faced with the phenomenon of crime like this, the question arises how the humanitarian crisis that occurs in human trafficking can be defended through public theology?

There are three basic questions to be answered in this thesis: (1) What is the background of Felix Wilfred's public theology thoughts? (2) How does Felix Wilfred formulate Asian-style Public Theology to defend various issues of fencing that threaten the dignity of humans and nature? (3) What are the implications of Felix Wilfred's public theology for the pastoral needs of the Indonesian Church when dealing with victims of human trafficking? The method used in writing this thesis is the method of literature. In supporting this method, the author uses several main sources of public theology Felix Wilfred and other sources as supports in writing the thesis.

Felix Wilfred developed a postcolonial theology with a focus on the poor and the subaltern as a focus of defense in the public space. This postcolonial

theological pattern has four backgrounds as the basis for the development of public theology, namely the situation of authoritarian state policies (state despotism), discriminatory economic situations (tyranny of the market), inharmonious and closed situations (exclusive communities and non-harmonious) and situations of excessive exploitation of agricultural products (commercial the livelihood). For Felix Wilfred, the four main issues of public theology above have an impact on a humanitarian crisis that threatens human dignity in the public space so that the defense efforts needed by all humans, especially the poor and subalterns are the creation of a State Public Policy that must protect the people, people's lives must be more harmonious and open (open-ended), create non-discriminatory economic needs, and protect the remaining livelihoods due to deprivation. The process of advocating with cross-border public theology is a cross-border public theology movement involving interreligious movements, intercultural movements, interdisciplinary movements, and social advocacy movements. According to Felix Wilfred, the distinctiveness of public theology in the public sphere is that it must be open and involved in harmony and be ready to cooperate with many parties and public theology to side with the poor and subalterns. The distinctiveness of Felix Wilfred's public theology stems from Jesus' public act of giving water of life to the Samaritan woman. This public action is an act of generosity, especially for people who are experiencing a humanitarian crisis, such as a Samaritan helping people who are being tortured on the street (good Samaritan).

Dealing with the crime of human trafficking in Indonesia which is included in the category of a humanitarian crisis and the process of achieving it threatens the economy in a discriminatory way for the poor and subalterns, the author positions the victims of human trafficking as the poor and subalterns in the public sphere. Public theology developed by Felix Wilfred is still very relevant and public in nature because public theology transcends borders or crosses borders to defend victims of human trafficking in Indonesia. As a cross-border public theology, the author provides important recommendations for Indonesian churches in a multicultural and multireligious context when dealing with the phenomenon of human trafficking.

